

**OPTIMALISASI KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK DI KOTA DENPASAR:  
PENDEKATAN ADMINISTRASI PUBLIK UNTUK MEWUJUDKAN  
PERLINDUNGAN DAN KESEJAHTERAAN ANAK**

**I Kadek Rian Prayana**

Universitas Udayana

Email Korespondensi: rian.prayana@unud.ac.id

**ABSTRACT**

This study aims to analyze the implementation of the Child-Friendly City (CFC) policy in Denpasar City, focusing on achievements, challenges, and relevant improvement strategies. A qualitative descriptive approach was employed, utilizing data from policy documents, statistical records, and insights from related institutions such as the Denpasar City Office for Women's Empowerment and Child Protection. The analysis was guided by Van Meter and Van Horn's policy implementation theory, good governance theory, sustainable development theory, and the theory of public participation. The findings indicate that Denpasar City has made significant progress in implementing the CFC initiative through the establishment of task forces, regional child forums, and the provision of child-friendly facilities such as playgrounds, child-friendly health centers, and child-friendly schools. However, challenges remain, including limited inter-agency coordination, unequal access to services in suburban areas, low levels of community and child participation, and insufficient human resource capacity. Strategic recommendations include strengthening inter-agency coordination, ensuring equitable distribution of child-friendly facilities, enhancing community participation, building institutional capacity, and raising social awareness about children's rights. By implementing evidence-based policies and inclusive governance, Denpasar is expected to serve as a model child-friendly city in Indonesia.

**Keywords:** Child-Friendly City, Policy implementation, Public participation.

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Denpasar, dengan fokus pada pencapaian, tantangan, dan strategi peningkatan yang relevan. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan dengan sumber data berupa dokumen kebijakan, data statistik, serta wawasan dari instansi terkait, seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Denpasar. Analisis dilakukan menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, teori good governance, teori pembangunan berkelanjutan, dan teori partisipasi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kota Denpasar telah mencapai kemajuan signifikan dalam implementasi KLA melalui pembentukan gugus tugas, forum anak daerah, dan pengadaan fasilitas ramah anak seperti taman bermain, puskesmas ramah anak, dan sekolah ramah anak. Namun, sejumlah tantangan masih dihadapi, seperti kurangnya koordinasi lintas perangkat daerah, kesenjangan akses layanan di wilayah pinggiran, rendahnya partisipasi masyarakat dan anak, serta keterbatasan kapasitas sumber daya manusia. Rekomendasi strategis meliputi penguatan koordinasi antarinstansi, pemerataan fasilitas ramah anak, peningkatan partisipasi masyarakat, pengembangan kapasitas kelembagaan, serta penyadaran sosial tentang pentingnya hak anak. Dengan penerapan kebijakan berbasis bukti dan tata kelola yang inklusif, Denpasar diharapkan dapat menjadi model kota yang ramah anak di Indonesia.

**Kata kunci:** Kota Layak Anak, Implementasi Kebijakan, Partisipasi Masyarakat.

**PENDAHULUAN**

Denpasar, sebagai ibu kota Provinsi Bali, merupakan pusat aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya yang dinamis (Artha, Arimbawa, & Juliathana, 2023). Dengan populasi yang terus bertambah dan

**Penerbit:**

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**

[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com)/[admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

Indexed:



keberagaman masyarakat yang tinggi, Denpasar menghadapi tantangan dalam memastikan kesejahteraan seluruh warganya, termasuk anak-anak. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah komitmen untuk mewujudkan Kota Layak Anak (KLA). Program KLA merupakan inisiatif nasional yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan kota yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal (Sinduwardoyo, 2022). Denpasar menunjukkan kesadaran yang tinggi akan pentingnya konsep ini, tercermin dari berbagai program dan kebijakan yang dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak, seperti peningkatan fasilitas pendidikan, penyediaan ruang terbuka hijau, dan pelaksanaan kampanye perlindungan anak.

Sebagai bentuk komitmen terhadap Kota Layak Anak, Denpasar telah menerapkan berbagai program dan kebijakan yang sejalan dengan indikator nasional KLA. Pemerintah Kota Denpasar berupaya memastikan pemenuhan hak anak melalui pengembangan fasilitas ramah anak, seperti taman bermain yang aman, layanan kesehatan anak yang terjangkau, serta peningkatan kualitas pendidikan (Maulani, Putra, & Siwalatri, 2022). Selain itu, kampanye perlindungan anak aktif dilakukan, termasuk penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya perlakuan yang adil dan bebas kekerasan terhadap anak. Namun, meskipun berbagai upaya telah dilakukan, masih terdapat tantangan yang menghambat realisasi Kota Layak Anak secara optimal, khususnya dalam hal pemerataan layanan, keterlibatan masyarakat, dan keberlanjutan kebijakan.

Namun, di balik berbagai upaya yang telah dilakukan, Pemerintah Kota Denpasar menghadapi sejumlah tantangan dalam mewujudkan Kota Layak Anak secara optimal. Tantangan ini meliputi kesenjangan akses terhadap layanan ramah anak di berbagai wilayah, keterbatasan sumber daya dalam pengelolaan program, serta rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung kebijakan ini. Dalam konteks ini, teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn menyoroti pentingnya koordinasi antar-stakeholder untuk mencapai tujuan kebijakan (Fauziyah & Arif, 2021). Selain itu, dari sudut pandang teori good governance, partisipasi, akuntabilitas, dan transparansi menjadi elemen penting yang perlu diperkuat. Tantangan-tantangan ini tidak hanya menjadi hambatan bagi Denpasar, tetapi juga menegaskan perlunya pendekatan berbasis bukti untuk mengevaluasi dan memperbaiki implementasi kebijakan KLA.

Berbagai penelitian terdahulu telah membahas implementasi Kota Layak Anak (KLA) dari berbagai perspektif, yang dapat memberikan pijakan bagi penelitian ini. Penelitian oleh Rahmawati (2020) menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mendukung implementasi kebijakan KLA, dengan temuan bahwa partisipasi masyarakat sangat memengaruhi keberhasilan program. Studi lain oleh Setiawan et al. (2021) mengevaluasi indikator-indikator KLA di kota-kota besar di Indonesia, menunjukkan bahwa tantangan utama terletak pada kesenjangan layanan antara wilayah perkotaan dan pinggiran. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Hartono (2019) mengungkapkan bahwa rendahnya kapasitas sumber daya manusia dan lemahnya pengawasan kebijakan menjadi hambatan signifikan dalam mewujudkan KLA yang berkelanjutan. Penelitian-penelitian ini memberikan gambaran awal tentang tantangan dan peluang dalam implementasi KLA, tetapi masih terbatas pada generalisasi nasional tanpa fokus spesifik pada Denpasar. Hal ini menunjukkan adanya ruang untuk penelitian lebih mendalam yang mengeksplorasi konteks lokal Denpasar dan bagaimana kota ini merespons tantangan tersebut dengan pendekatan yang sesuai.

Meskipun banyak penelitian yang membahas implementasi Kota Layak Anak, masih terdapat keterbatasan pada kajian yang menyoroti aspek-aspek lokal, terutama di kota-kota dengan karakteristik sosial dan budaya yang khas seperti Denpasar. Penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada analisis generalisasi di tingkat nasional, tanpa mengeksplorasi bagaimana kebijakan KLA diterapkan dalam konteks spesifik. Hal ini menciptakan kesenjangan penelitian (research gap) yang penting untuk diisi, mengingat setiap kota memiliki dinamika unik yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi baru dengan mengeksplorasi implementasi KLA di Denpasar, termasuk bagaimana tantangan lokal dapat diatasi melalui strategi yang sesuai.

Penelitian ini memiliki keunikan dibandingkan penelitian sebelumnya karena fokus pada evaluasi implementasi Kota Layak Anak (KLA) dalam konteks spesifik Kota Denpasar, yang memiliki karakteristik sosial dan budaya khas Bali. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang cenderung

menyoroti aspek generalisasi di tingkat nasional, penelitian ini akan mengeksplorasi tantangan lokal, seperti kesenjangan layanan antar-wilayah dalam kota, pengaruh kearifan lokal terhadap pelaksanaan kebijakan, serta tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung program KLA. Pendekatan ini penting untuk memberikan rekomendasi yang lebih aplikatif bagi Pemerintah Kota Denpasar. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memastikan keberlanjutan program KLA di Denpasar dalam menghadapi tantangan globalisasi dan urbanisasi yang semakin kompleks. Dengan memahami permasalahan dan potensi lokal secara mendalam, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada penguatan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) yang tidak hanya relevan bagi Denpasar, tetapi juga memberikan wawasan bagi kota-kota lain di Indonesia yang menghadapi tantangan serupa.

## METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif, dengan pendekatan studi kasus. Data yang digunakan diperoleh dari berbagai sumber, termasuk website resmi Pemerintah Kota Denpasar dan dokumen-dokumen yang disediakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Denpasar. Data yang diperoleh meliputi laporan tahunan, kebijakan-kebijakan terkait Kota Layak Anak (KLA), serta informasi mengenai program-program yang telah dilaksanakan untuk mendukung pemenuhan hak-hak anak di Kota Denpasar. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai implementasi kebijakan KLA di Kota Denpasar, serta tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam mewujudkan KLA tersebut. Selain itu, metode ini juga melibatkan analisis terhadap dokumen-dokumen kebijakan dan laporan evaluasi yang diterbitkan oleh pihak terkait untuk menggali lebih dalam tentang efektivitas pelaksanaan KLA dan peran masyarakat dalam program ini. Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk memahami kondisi aktual serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan KLA di Kota Denpasar, serta memberikan rekomendasi berdasarkan temuan yang diperoleh dari data yang ada.

## PEMBAHASAN

### Implementasi Kota Layak Anak Di Kota Denpasar

Implementasi kebijakan Kota Layak Anak (KLA) di Denpasar menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memastikan hak anak terpenuhi melalui berbagai program dan inisiatif yang strategis. Salah satu langkah awal yang dilakukan adalah pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak yang melibatkan seluruh perangkat daerah di tingkat kota, kecamatan, hingga kelurahan. Struktur ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan kebijakan KLA berjalan efektif dan merata di setiap wilayah. Selain itu, pemerintah juga menjamin partisipasi anak melalui pembentukan Forum Anak Daerah, yang telah dikuatkan dengan Surat Keputusan di setiap desa dan kelurahan di Kota Denpasar. Berbagai fasilitas pendukung, seperti ruang bermain anak, puskesmas ramah anak, dan sekolah ramah anak, telah disediakan untuk menunjang kebutuhan tumbuh kembang anak secara optimal. Tidak hanya itu, perhatian terhadap pendidikan anak usia dini hingga sekolah dasar juga menjadi fokus, dengan data jumlah siswa PAUD, TK, dan SD yang terus diperbarui, termasuk berdasarkan jenis kelamin, serta angka partisipasi kasar (APK) yang mencerminkan cakupan layanan pendidikan. Upaya ini merupakan bagian dari strategi menyeluruh Denpasar untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung kesejahteraan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.

### Kecamatan Layak Anak

Kota Denpasar mempunyai 4 kecamatan dan 43 desa / kelurahan. Tiap kecamatan telah membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Kecamatan Layak Anak dengan Surat Keputusan Camat. Kelompok Kerja (Pokja) Kecamatan Layak Anak terdiri dari Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama di tiap kecamatan. Dan apabila ada pergantian anggota, Surat Keputusan akan dirubah sesuai dengan nama yang ditunjuk. Surat Keputusan Camat tentang Kelompok Kerja Kecamatan Layak mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Mengkoordinasi pelaksanaan Kecamatan Layak Anak di Tingkat lingkungan – lingkungan
2. Menyusun mekanisme kerja
3. Mensosialisasikan Konsep Program Kota Layak Anak (KLA)

**Penerbit:**

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**  
[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com)/[admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

Indexed:



4. Menentukan fokus utama kegiatan dalam mewujudkan Kecamatan Layak Anak yang disesuaikan dengan masalah utama, kebutuhan dan sumber daya
5. Menyiapkan dan mengusulkan program kecamatan dan tindak lanjut lainnya yang terkait dengan kecamatan layak anak
6. Melakukan kegiatan monitoring atau evaluasi dan melaporkan secara periodic kepada camat
7. Untuk anggaran, dianggarkan di DPA OPD Kecamatan untuk kegiatan Kelompok Kerja (Pokja) Kecamatan Layak Anak

## Kelurahan Layak Anak

Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Kecamatan Layak Anak di 4 Kecamatan juga dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) kelurahan layak anak di 43 desa / kelurahan layak anak, dan disahkan dengan Surat Keputusan Lurah. Tidak jauh berbeda dengan kelompok kerja (Pokja) di Kecamatan mempunyai tugas yang sama untuk Kelompok kerja (Pokja) yang ada di kelurahan, yang terdiri dari Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama. Untuk anggaran, dianggarkan di DPA OPD kecamatan untuk kelurahan dengan besaran disesuaikan dengan kebutuhan untuk kegiatan kelompok kerja kelurahan dan Dana Pembangunan Kelurahan (DPK).

## Forum Anak Daerah

Untuk mendukung perkembangan anak secara optimal, diperlukan wadah yang sesuai dengan tahap perkembangan jiwa dan usia mereka, baik berupa lembaga pendidikan formal, non-formal, maupun forum pengasuhan lainnya. Forum anak, sebagai salah satu wujud keterlibatan anak dalam pembangunan, bersifat inklusif dan bertujuan mendorong partisipasi anak dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan langsung dengan kehidupan mereka. Keberadaan forum ini juga membantu anak mengembangkan kepribadian yang mandiri, otonom, dan kritis dengan pendampingan dari tenaga pendidik untuk memaksimalkan kreativitas dan minat mereka. Partisipasi anak merupakan hak mendasar yang diakui dalam Konvensi Hak-hak Anak, termasuk hak untuk mengemukakan pendapat, bertemu, dan berserikat, sebagaimana diatur dalam Pasal 15. Di Kota Denpasar, keberadaan forum anak dan lembaga yang mengurus kesejahteraan serta hak sipil anak, seperti kelompok bermain dan taman kanak-kanak, menjadi bagian penting dari upaya pemerintah untuk memastikan terpenuhinya hak-hak anak secara menyeluruh.

**Tabel 1: Daftar Forum Anak Daerah dan No. SK**

NO.	FORUM ANAK	KOTA / KEC.	NO SK
1	Forum Anak Daerah Kota	Kota Denpasar	188.45/889/HK/2021
2	Forum Anak Kec.Denbar	Denpasar Barat	188.4/30/DENBAR/2021
3	Forum Anak Kec.Dentim	Denpasar Timur	240/45/KEC.DENTIM/2021
4	Forum Anak Kec.Denut	Denpasar Utara	34/KEC.DENUT/2021
5	Forum Anak Kec.Densel	Denpasar Selatan	188/46/KEC.DENSEL/2021
6	Desa Tegal Harum	Denpasar Barat	188.4/61/KEP/2022
7	Desa Tegal Kertha	Denpasar Barat	188.4/89/KEP/2019
8	Desa Dauh Puri Kelod	Denpasar Barat	188.4/73/KEP/2021
9	Desa Padang Sambian Kelod	Denpasar Barat	188.4/54/KEP/2021
10	Desa Dauh Puri Kauh	Denpasar Barat	188.4/68/KEP/2022
11	Desa Dauh Puri Kangin	Denpasar Barat	188.4/78/KEP/2021
12	Desa Ubung Kaja	Denpasar Utara	99/2022
13	Desa Daging Puri Kangin	Denpasar Utara	350/109/VIII/2023
14	Kelurahan Ubung	Denpasar Utara	48/KEL.UBUNG/2022
15	Kelurahan Penatih	Denpasar Timur	06/2023
16	Kelurahan Sumerta	Denpasar Timur	188.4/04.Kel.Sumerta/2023
17	Desa Penatih Daging Puri	Denpasar Timur	122/2019
18	Desa kesiman Kertalangu	Denpasar Timur	188.4/43/2019
19	Kelurahan Pedungan	Denpasar Selatan	476/10/I/2023

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com)/[admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

Indexed:



20	Kelurahan Sesetan	Denpasar Selatan	188.4/02/SK/2021
----	-------------------	------------------	------------------

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Denpasar, 2023.

Forum Anak Daerah di tingkat Kota, Kecamatan, maupun Kelurahan berfungsi sebagai wadah untuk memberikan kesempatan kepada anak tidak saja menyalurkan aspirasi dan bakat, melainkan melatih anak memetakan masalah dan memecahkan masalah yang dihadapi.

### Pusat Kreativitas Anak (PKA)

Pusat Kreativitas Anak (PKA) memberikan manfaat dengan menyelenggarakan berbagai kegiatan permainan yang bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan intelektual anak. Selain itu, PKA juga menyediakan kegiatan permainan yang dapat meningkatkan kecerdasan emosional anak. PKA juga mendorong anak untuk menciptakan, berkreasi, dan berinovasi. Selain itu, PKA berfungsi sebagai tempat untuk mengadakan berbagai kegiatan yang melibatkan anak.

Anak memiliki hak untuk memiliki waktu istirahat dan memanfaatkan waktu senggangnya untuk melakukan berbagai kegiatan seni, budaya, olahraga, dan aktivitas lainnya. Hal ini diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011. Fasilitas bermain, rekreasi, dan pengembangan kreativitas anak harus tersedia untuk mendukung hak ini. Adapun jumlah PKA dan RBRA yang ada di Kota Denpasar, sebagai berikut

**Tabel 2: Pusat Kreativitas Anak**

No.	Nama PKA dan RBRA	Jumlah
1	Extrem Park	1
2	Youth Park	1
3	Dharma Negara Alaya (DNA)	1
4	Sanggar Tari	142
5	Sanggar Tabuh	85
6	Sanggar Lukis	42
7	Fasilitas Kreatifitas di masing-masing Banjar	405
8	Taman Bermain Puputan	1
9	Taman Lalu Lintas	1
10	Ruang Bermain Taman Janggan	1
11	Tukad Bindu	1
12	Taman Bermain Lumintang	1

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Denpasar, 2023.

Di Kota Denpasar, terdapat total 682 Pusat Kreativitas Anak (PKA) dan Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) yang tersebar di seluruh kecamatan. Fasilitas kreativitas yang tersedia berjumlah 405, termasuk sanggar tari, sanggar tabuh, dan sanggar lukis. Meskipun demikian, perlu peningkatan jumlah taman bermain karena peranannya yang penting tidak hanya dalam perkembangan motorik anak, tetapi juga dalam pengembangan kemampuan kognitif, sosial, fisik, dan emosional yang diperlukan saat mereka tumbuh dewasa.

**Puskesmas Ramah Anak**

Berdasarkan Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45 / 400 / HK / 2023 tentang Puskesmas Ramah Anak tanggal 16 Februari 2023

**Tabel 3: Puskesmas Ramah Anak**

No	Kecamatan	Nama Puskesmas	Alamat
1	Denpasar Barat	UPTD Puskesmas I Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Barat	Jalan Gunung Rinjani No. 65, Tegal Kertha, Denpasar Barat, Kota Denpasar
		UPTD Puskesmas II Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Barat	Jalan Gunung Sopotan Gang Puskesmas No. 3, Pemecutan Kelod, Denpasar Barat, Kota Denpasar
2	Denpasar Utara	UPTD Puskesmas I Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Utara	Jalan Angsoka No.17, Dangin Puri Kangin, Denpasar Utara, Kota Denpasar
		UPTD Puskesmas II Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Utara	Jalan Gunung Agung Gang II No. 8 X, Pemecutan Kaja, Denpasar Utara, Kota Denpasar
		UPTD Puskesmas III Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Utara	Jalan Ahmad Yani No. 110, Dauh Puri Kaja, Denpasar Utara, Kota Denpasar
3	Denpasar Timur	UPTD Puskesmas I Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Timur	Jalan Pucuk No. 1, Sumerta, Denpasar Timur, Kota Denpasar
		UPTD Puskesmas II Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Timur	Jalan Nagasari No. 25 A, Penatih Dangin Puri, Denpasar Timur, Kota Denpasar
4	Denpasar Selatan	UPTD Puskesmas I Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Selatan	Jalan Gurita No. 8, Sesetan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar
		UPTD Puskesmas II Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Selatan	Jalan Danau Buyan III, Sanur, Denpasar Selatan, Kota Denpasar
		UPTD Puskesmas III Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Selatan	Jalan Gelogor Carik No. 17, Pemogan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar
		UPTD Puskesmas IV Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Selatan	Jalan Pulau Moyo No. 63 A, Pedungan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Denpasar, 2024

Pada hakekatnya Pembangunan yang sesungguhnya adalah menjadikan manusia sebagai tujuan akhir dalam Pembangunan. Pembangunan manusia merupakan wujud dari tujuan jangka Panjang dari

**Penerbit:**

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)  
[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com)/[admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

Indexed:



sebuah masyarakat, dan meletakkan Pembangunan di sekeliling manusia, bukannya manusia di sekeliling pembangunan. Dalam hal ini Pendidikan merupakan proses untuk mendapatkan masyarakat yang cerdas. Untuk mencapai tujuan ini, Pembangunan manusia menjadi sebuah prioritas penting bagi sebuah negara. Oleh karena itu, pemerintah secara terus menerus berupaya untuk meningkatkan mutu pendidikan yaitu dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menikmati pendidikan terutama di tingkat dasar. Selain itu peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan juga ditingkatkan.

**Jumlah Siswa PAUD menurut Jenis Kelamin Tahun 2023-2024 per Kecamatan**

**Gambar 1: Jumlah Siswa PAUD menurut Jenis Kelamin Tahun 2023-2024 per Kecamatan**

Denpasar	KB		TPA		SPS	
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
Utara	46	48	24	16	0	0
Timur	59	55	0	0	0	0
Selatan	186	126	26	17	0	0
Barat	68	64	3	1	13	9

PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) mencakup berbagai jenis layanan pendidikan, seperti KB (Kelompok Bermain), TPA (Tempat Penitipan Anak), SPS (Satuan PAUD Sejenis). Secara umum, kesetaraan gender dalam partisipasi PAUD terlihat cukup baik di sebagian besar wilayah, kecuali Denpasar Selatan di mana terdapat perbedaan signifikan dalam jumlah siswa laki-laki dan perempuan di KB. Partisipasi di TPA dan SPS terlihat sangat rendah di sebagian besar wilayah. Ini mungkin menunjukkan kurangnya layanan ini atau kurangnya kesadaran dan kebutuhan dari masyarakat. Kecamatan Denpasar Selatan memiliki jumlah siswa KB tertinggi baik untuk laki-laki maupun perempuan, namun menunjukkan ketidakseimbangan gender yang signifikan. Kecamatan Denpasar Barat menunjukkan adanya partisipasi dalam SPS, meskipun jumlahnya relatif kecil.

**Jumlah Siswa TK menurut Jenis Kelamin Tahun 2023-2024 per Kecamatan**

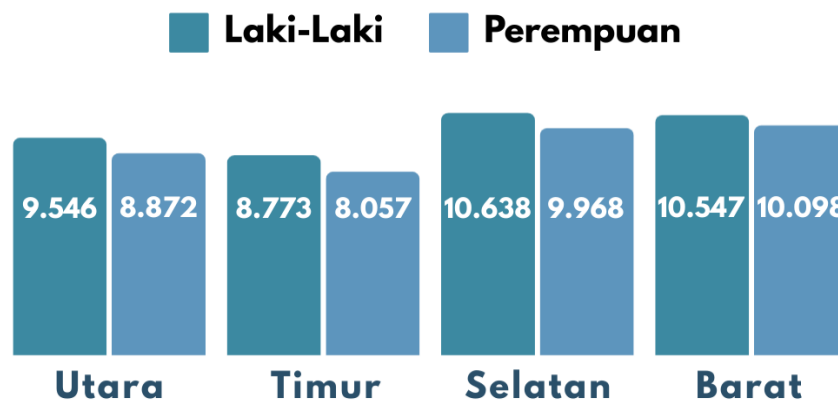
**Gambar 2: Jumlah Siswa TK menurut Jenis Kelamin Tahun 2023-2024 per Kecamatan**



Secara umum, di semua kecamatan, jumlah siswa laki-laki lebih banyak dibandingkan siswa perempuan. Meskipun ada perbedaan jumlah, partisipasi pendidikan TK menunjukkan tren yang cukup merata dengan distribusi yang tidak terlalu jauh antara kedua jenis kelamin. Denpasar Selatan memiliki jumlah siswa TK tertinggi, diikuti oleh Denpasar Barat, Denpasar Utara, dan Denpasar Timur. Ini menunjukkan variasi dalam partisipasi pendidikan usia dini di berbagai kecamatan, mungkin dipengaruhi oleh faktor demografis, kesadaran pendidikan, dan ketersediaan fasilitas pendidikan.

**Jumlah Siswa SD menurut Jenis Kelamin Tahun 2023-2024 per Kecamatan**

**Gambar 3: Jumlah Siswa SD menurut Jenis Kelamin Tahun 2023-2024 per Kecamatan**



Jumlah siswa SD laki-laki di Denpasar Utara, Denpasar Timur, dan Denpasar Barat lebih banyak dibandingkan jumlah siswa perempuan dengan masing – masing selisih 674, 716, dan 449 siswa. Denpasar Selatan memiliki jumlah siswa SD tertinggi baik untuk laki-laki maupun perempuan dibandingkan kecamatan lainnya. Perbedaannya adalah 670 siswa laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan. Ketimpangan gender ini bervariasi, dengan Denpasar Timur menunjukkan perbedaan yang paling signifikan, sementara Denpasar Barat menunjukkan perbedaan yang paling kecil.

**Sekolah Ramah Anak**

Sekolah Ramah Anak (SRA) bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan menyenangkan bagi anak-anak yang bersekolah. Implementasi konsep SRA tidak hanya bergantung pada peran guru dan pihak sekolah, tetapi juga melibatkan siswa, orang tua, dan masyarakat secara keseluruhan. Konsep SRA mencakup program-program yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, bersih, sehat, peduli terhadap lingkungan, serta memiliki budaya yang mendukung, yang mampu menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan yang tidak pantas, selama anak berada di lingkungan sekolah. Lebih dari itu, SRA juga bertujuan untuk mendukung partisipasi aktif anak-anak, terutama dalam hal perencanaan, kebijakan, proses pembelajaran, dan pengawasan di lingkungan sekolah.

Sekolah Ramah Anak tidak melibatkan pembangunan sekolah baru, tetapi mengubah kondisi sekolah yang sudah ada menjadi tempat yang nyaman bagi anak-anak, serta memastikan bahwa sekolah tersebut memenuhi hak-hak mereka dan melindungi mereka, karena sekolah merupakan rumah kedua bagi anak setelah rumah mereka sendiri (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2015). Proses pembentukan dan pengembangan SRA didasarkan pada prinsip-prinsip fundamental, seperti non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, perlindungan terhadap kehidupan anak, penghormatan terhadap perkembangan anak, dan manajemen yang baik.

Dengan semua sekolah di Denpasar telah dianggap sebagai Sekolah Ramah Anak, dapat dikatakan bahwa tujuan peluncuran SRA di Kota Denpasar telah berhasil tercapai. Hal ini diharapkan tidak hanya akan menghasilkan generasi yang cerdas secara intelektual, tetapi juga secara emosional dan spiritual, mengingat bahwa tujuan SRA adalah untuk memenuhi, menjamin, dan melindungi hak anak, serta mempersiapkan mereka untuk bertanggung jawab dalam kehidupan yang penuh toleransi, saling menghormati, dan bekerja sama demi kemajuan dan semangat perdamaian.

Kota Denpasar telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mewujudkan Kota Layak Anak (KLA) melalui berbagai langkah strategis, seperti pembentukan Gugus Tugas KLA, penyediaan fasilitas ramah anak, dan pengintegrasian partisipasi anak melalui Forum Anak Daerah. Namun, keberhasilan implementasi kebijakan ini perlu dianalisis dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, yang mencakup enam variabel utama: standar dan tujuan kebijakan, sumber daya,

komunikasi antar-organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial-ekonomi, serta kecenderungan sikap pelaksana.

## 1. Standar dan Tujuan Kebijakan

Pemerintah Kota Denpasar telah menetapkan indikator yang sejalan dengan kebijakan nasional KLA, seperti pembentukan ruang bermain anak, puskesmas ramah anak, dan sekolah ramah anak. Standar ini menjadi acuan yang jelas dalam pelaksanaan kebijakan. Namun, keberagaman tingkat pemahaman di antara perangkat daerah terkait tujuan kebijakan ini masih menjadi tantangan, terutama di tingkat kelurahan dan desa.

## 2. Sumber Daya

Pemerintah Denpasar telah menyediakan berbagai fasilitas, seperti taman bermain dan layanan kesehatan ramah anak, yang menunjukkan alokasi sumber daya fisik yang memadai. Namun, keterbatasan sumber daya manusia di beberapa wilayah, khususnya terkait pengelolaan forum anak dan program-program pendukung, dapat menghambat optimalisasi kebijakan. Ini sejalan dengan temuan Van Meter dan Van Horn, bahwa kelengkapan dan kualitas sumber daya menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan.

## 3. Komunikasi Antar-Organisasi

Komunikasi antara Gugus Tugas KLA, perangkat daerah, dan masyarakat menjadi elemen kunci dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam praktiknya, masih terdapat kendala dalam sinkronisasi program antara tingkat kota, kecamatan, dan kelurahan, yang menyebabkan ketidakefisienan pelaksanaan. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan koordinasi antar-stakeholder untuk mencapai tujuan kebijakan secara kolektif.

## 4. Karakteristik Agen Pelaksana

Keberadaan perangkat daerah yang beragam dalam Gugus Tugas KLA memberikan potensi besar untuk pelaksanaan kebijakan yang holistik. Namun, perbedaan kapasitas dan pemahaman antar-agen pelaksana sering kali menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan secara seragam.

## 5. Kondisi Sosial-Ekonomi

Kota Denpasar memiliki keberagaman sosial-ekonomi yang memengaruhi akses masyarakat terhadap fasilitas ramah anak. Ketimpangan layanan antara wilayah perkotaan dan pinggiran menjadi tantangan utama, yang membutuhkan pendekatan berbasis inklusi sosial untuk menjamin pemerataan manfaat kebijakan.

## 6. Kecenderungan Sikap Pelaksana

Sikap dan komitmen pelaksana kebijakan di tingkat daerah menunjukkan kesadaran yang tinggi akan pentingnya KLA. Namun, motivasi dan persepsi yang kurang seragam di tingkat masyarakat mengindikasikan perlunya pendekatan yang lebih persuasif dan edukatif dalam meningkatkan kesadaran kolektif.

Berdasarkan analisis tersebut, keberhasilan implementasi KLA di Denpasar memerlukan penguatan koordinasi antar-stakeholder, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan upaya untuk mengatasi kesenjangan akses layanan. Selain itu, pendekatan yang melibatkan masyarakat secara inklusif, melalui forum anak dan partisipasi aktif warga, dapat meningkatkan efektivitas kebijakan. Dengan mengacu pada teori Van Meter dan Van Horn, penyelarasan antara standar kebijakan, sumber daya, dan sikap pelaksana menjadi kunci utama dalam mewujudkan Denpasar sebagai Kota Layak Anak yang ideal.

## Analisis Tantangan Dalam Implementasi Kota Layak Anak Di Kota Denpasar

Meskipun Kota Denpasar telah mencatat sejumlah kemajuan dalam implementasi Kota Layak Anak (KLA), terdapat beberapa tantangan signifikan yang harus diatasi untuk memastikan keberlanjutan program. Tantangan-tantangan ini dapat dianalisis lebih lanjut melalui pendekatan teori *good governance*, pembangunan berkelanjutan, dan partisipasi masyarakat.

### 1. Tantangan Koordinasi dan Transparansi (*Good Governance*)

Prinsip *good governance* menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan koordinasi yang efektif. Dalam konteks KLA di Denpasar, salah satu tantangan utama adalah sinkronisasi kebijakan dan program di berbagai tingkat pemerintahan, mulai dari

tingkat kota hingga kelurahan. Selain itu, keterbukaan informasi terkait indikator KLA, seperti data layanan ramah anak atau laporan pelaksanaan program, masih perlu ditingkatkan untuk memastikan akuntabilitas kepada masyarakat.

## 2. Kesenjangan Layanan antara Wilayah Perkotaan dan Pinggiran (Pembangunan Berkelanjutan)

Tantangan dalam mencapai keadilan sosial menjadi perhatian penting dalam pembangunan berkelanjutan. KLA di Denpasar menghadapi kesenjangan dalam penyediaan fasilitas ramah anak antara wilayah perkotaan yang lebih berkembang dan wilayah pinggiran. Ketimpangan ini mencakup akses terhadap taman bermain, puskesmas ramah anak, dan sekolah ramah anak, yang lebih banyak tersedia di pusat kota dibandingkan di daerah pinggiran. Hal ini dapat menghambat upaya untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan setara bagi semua anak.

## 3. Rendahnya Partisipasi Masyarakat (Partisipasi Masyarakat)

Arnstein (1969) menekankan bahwa partisipasi masyarakat harus melibatkan warga dalam proses pengambilan keputusan secara bermakna, bukan sekadar formalitas. Di Denpasar, meskipun Forum Anak Daerah telah dibentuk, partisipasi masyarakat, terutama anak-anak, dalam perencanaan dan pelaksanaan program KLA masih relatif rendah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kontribusi mereka, serta terbatasnya akses informasi yang memungkinkan mereka berperan aktif.

## 4. Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan (*Good Governance* dan Pembangunan Berkelanjutan)

Kapasitas sumber daya manusia, baik di tingkat pemerintah maupun komunitas, menjadi tantangan dalam memastikan keberlanjutan program KLA. Banyak perangkat daerah dan pengelola Forum Anak yang belum sepenuhnya memahami peran mereka dalam mendukung implementasi KLA. Selain itu, kelembagaan yang ada belum sepenuhnya terintegrasi untuk memberikan layanan yang konsisten dan berkelanjutan.

## 5. Hambatan Sosial dan Budaya (Pembangunan Berkelanjutan)

Tantangan sosial dan budaya, seperti norma tradisional yang masih membatasi peran anak dalam pengambilan keputusan, juga menjadi kendala. Kesadaran masyarakat mengenai hak anak dan pentingnya lingkungan yang ramah anak perlu ditingkatkan melalui kampanye dan edukasi yang berkelanjutan.

*Good Governance*: Tantangan-tantangan seperti koordinasi, transparansi, dan kapasitas kelembagaan menggarisbawahi perlunya penguatan prinsip-prinsip good governance dalam implementasi KLA. Pemerintah Denpasar harus memperbaiki tata kelola yang mencakup keterbukaan informasi, mekanisme pengawasan, dan akuntabilitas pelaksanaan program.

*Pembangunan Berkelanjutan*: Kesenjangan layanan dan hambatan sosial mencerminkan pentingnya pendekatan pembangunan berkelanjutan yang inklusif. Pemerintah harus memastikan akses yang setara terhadap fasilitas KLA di seluruh wilayah, sambil memperhatikan keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

*Partisipasi Masyarakat*: Rendahnya partisipasi masyarakat menunjukkan perlunya penguatan pendekatan partisipatif, sesuai dengan teori Arnstein. Program-program KLA harus dirancang untuk memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat, khususnya anak-anak, dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan. Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini melalui pendekatan yang berbasis teori, Kota Denpasar dapat memperkuat implementasi KLA secara lebih inklusif, berkelanjutan, dan akuntabel.

## KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa implementasi Kota Layak Anak (KLA) di Kota Denpasar telah mengalami berbagai kemajuan yang patut diapresiasi, seperti pembentukan gugus tugas KLA, forum anak daerah, serta penyediaan fasilitas ramah anak yang mencakup puskesmas, taman bermain, dan sekolah ramah anak. Namun, di balik kemajuan tersebut, terdapat sejumlah tantangan signifikan yang perlu diatasi untuk mencapai tujuan KLA secara optimal. Beberapa tantangan utama yang

**Penerbit:**

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**  
[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com)/[admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

Indexed:



diidentifikasi dalam penelitian ini antara lain adalah kurangnya koordinasi dan transparansi antarinstansi, ketimpangan dalam penyediaan layanan antara daerah perkotaan dan pinggiran, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dan anak, serta hambatan dalam kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan yang masih terbatas. Berdasarkan kajian teori implementasi kebijakan, good governance, pembangunan berkelanjutan, dan partisipasi masyarakat, ditemukan bahwa keberhasilan KLA di Kota Denpasar sangat bergantung pada penerapan tata kelola yang baik, keterlibatan aktif dari masyarakat, serta pendekatan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, sejumlah rekomendasi penting perlu diterapkan, antara lain penguatan koordinasi antarinstansi untuk memastikan integrasi program KLA hingga tingkat kecamatan dan kelurahan melalui sistem monitoring dan evaluasi yang berbasis digital, transparan, dan akuntabel. Selain itu, distribusi fasilitas ramah anak, seperti taman bermain, sekolah ramah anak, dan puskesmas ramah anak, perlu diperluas ke wilayah pinggiran dengan mempertimbangkan prinsip keadilan sosial sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan. Rekomendasi lainnya adalah peningkatan partisipasi anak dan masyarakat, yang dapat dicapai melalui edukasi yang lebih intensif mengenai hak dan peran mereka dalam program KLA melalui pelatihan atau kampanye yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, seperti sekolah, lembaga pendidikan nonformal, dan organisasi masyarakat. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan juga sangat penting, dengan melibatkan pelatihan khusus bagi perangkat daerah dan pengelola program KLA untuk memperdalam pemahaman mereka tentang konsep dan implementasi KLA. Selain itu, perbaikan sistem kelembagaan dan alur kerja yang jelas akan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program. Terakhir, perlu dilakukan upaya sosialisasi secara luas mengenai pentingnya konsep Kota Layak Anak melalui berbagai media, termasuk media sosial, untuk mengubah pola pikir masyarakat dan menciptakan dukungan budaya yang lebih besar terhadap hak anak. Dengan menerapkan rekomendasi-rekomendasi ini, Kota Denpasar dapat lebih optimal dalam mewujudkan visinya sebagai kota ramah anak yang menjamin kesejahteraan anak dan memenuhi hak-hak mereka secara berkelanjutan.

## REFERENSI

- Artha, I. K. G. J., Arimbawa, W., & Juliarthana, I. N. H. (2023). Pengaruh Pola Aktivitas Masyarakat Terhadap Konfigurasi Ruang Dengan Pendekatan Space Syntax Di Pusat Kota Denpasar. *Pranatacara Bhumandala: Jurnal Riset Planologi*, 4(1), 1-21.
- Fauziyah, W. E., & Arif, L. (2021). Model Implementasi Kebijakan Van Meter Dan Van Horn Dalam Tinjauan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan (Ring Road) Di Kabupaten Tuban. *Journal Publicuho*, 4(2), 672-691.
- Maulani, A. C., Putra, I. D. G. A. D., & Siwalatri, N. K. A. (2022). Perancangan Fasilitas Edutainment Park Di Denpasar. *Humantech: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 2(Special Issues 1), 141-147.
- Putri, N. L., & Hartono, D. (2019). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia Dan Pengawasan Terhadap Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak. *Jurnal Kebijakan Publik*, 5(3), 199-215.
- Rahmawati, A. (2020). Peran Kolaborasi Antara Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(2), 45-59.
- Setiawan, F., Wijaya, R., & Suryanto, P. (2021). Evaluasi Indikator Kota Layak Anak Di Kota-Kota Besar Di Indonesia. *Jurnal Perencanaan Pembangunan*, 8(1), 112-130.
- Sinduwardoyo, H. F. (2022). *Evaluasi Program Kota Layak Anak (Kla) Terhadap Tumbuh Kembang Anak Di Kelurahan Ciganjur Jakarta Selatan* (Bachelor's Thesis, Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Uin Syarif Hidayatullah Jakarta).